



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2670-2680

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Masalah Ketimpangan Pendidikan Indonesia dengan Kajian Struktural Fungsional

Robert K. Merton

Daniel^{1✉}, Yohanes Bahari²

Universitas Tanjungpura

Email: F2281231001@student.untan.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia dengan menggunakan kajian perspektif struktural fungsional Robert King Merton. Masyarakat dianggap memiliki beragam struktur subsistem yang berbeda-beda, yang berasal dari perbedaan struktur dan makna fungsionalnya yang memberikan kontribusi pada keseluruhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Fokusnya akan merujuk pada masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia menggunakan teori struktural fungsional Robert K. Merton, mulai dari mengungkapkan masalah ketimpangan pendidikan, mekanismenya, serta dampaknya, semua dianalisis dengan menggunakan kerangka teori struktural fungsional Robert K. Merton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemikiran Robert King Merton yang berkaitan dengan fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest. Ketimpangan pendidikan memiliki dampak yang melampaui pengaruhnya terhadap individu secara langsung, tetapi juga memiliki efek yang signifikan terhadap stabilitas dan kesatuan sosial secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan dan disintegrasi dalam masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dapat menciptakan ketidakpuasan yang dapat mengganggu keseimbangan dan harmoni sosial. Ketimpangan pendidikan akan berdampak pada dinamika sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Ketimpangan Pendidikan, Robert King Merton, Struktural Fungsional.*

Abstract

This research aims to explore the issue of educational disparity in Indonesia using Robert King Merton's structural functionalist perspective. The community is considered to have various subsystem structures, which originate from differences in their structures and functional meanings that contribute to the overall society. The method used in this research is qualitative with a library study approach. Its focus will refer to the issue of educational disparity in Indonesia using Robert K. Merton's structural functionalist theory, starting from unveiling the problem of educational disparity, its mechanisms, and its impacts, all analyzed using Robert K. Merton's structural functionalist theory framework. The research results show that there is a thought by Robert King Merton related to function, dysfunction, latent function, and manifest function. Educational disparity has an impact that goes beyond its direct influence on individuals, but also has a significant effect on the stability and unity of society as a whole. This can lead to tension and disintegration in society. Inequality in access to education can create dissatisfaction that can disrupt social balance and harmony. Educational disparity will affect the social dynamics in society.

Keyword: *Educational Disparity, Robert King Merton, Structural Functionalism*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu berpikir secara kritis dan mandiri (independent critical thinking) sebagai modal dasar untuk pembangunan manusia seutuhnya yang memiliki kualitas yang sangat prima (Maunah, 2016). Oleh sebab itu, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang dalamnya (Alpian et al., 2019). Pendidikan juga menjadi bagian yang penting dalam kehidupan dan menjadi hak bagi semua orang untuk menerimanya (Byrne, 2013), serta pendidikan menjadi langkah dalam menumbuhkan pemikiran mandiri, kreativitas, dan inovasi (Leahy, 2016), yang menjadikan pendidikan sebagai proses yang tidak berakhir, yang selalu berlanjut, sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan untuk perwujudan sosok manusia masa depan, dan berasal dari nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila. Oleh sebab itu, pendidikan harus menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai filosofis dan budaya bangsa secara komprehensif dan menyeluruh (Sujana, 2019). Di Indonesia, negara menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan pendidikan, seperti yang tercermin dalam berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah. Komitmen ini dapat ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) dan (4), yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memajukan sistem pendidikan nasional. Pasal tersebut menetapkan

bahwa pemerintah wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan secara nasional sesuai dengan Undang-undang, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan, minimal 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Nurhuda, 2022).

Namun, pada pelaksanaannya, pendidikan tidak luput dari masalah yang terjadi yang memicu rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia (Fitri, 2021). Hal ini didukung dengan skor PISA (Programme for International Student Assessment) dimana Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara yang ikut serta dalam evaluasi tersebut (Schleicher, 2019). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023, ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Informasi terkait tingkat pendidikan tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan bahwa sekitar 5,11% penduduk desa belum pernah mengenyam pendidikan, dan 12,39% tidak menyelesaikan pendidikan dasar (SD). Sementara itu, di wilayah perkotaan, hanya 1,93% penduduk yang belum pernah sekolah, dan 6,62% tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Data juga mengungkapkan bahwa di perkotaan, sebanyak 49,16% penduduk usia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajat. Namun, di desa, hanya 27,98% penduduk yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut. Secara umum, data tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk di perdesaan hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD, yakni sekitar 31,13% (Badan Pusat Statistik, 2023). Selain itu, sebagian masyarakat masih percaya bahwa sekolah di luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik daripada di dalam negeri, hingga pandangan semacam itu bisa dimaklumi karena ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pencapaian pemerataan pendidikan belum mencapai tahap yang optimal. Bahkan, permasalahan pemerataan pendidikan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain (Reay, 2018; Tchamyoun, 2020).

Ketidakmerataan pendidikan melibatkan dua aspek, yakni kualitas pendidikan (melibatkan Service Learning) dan jumlah pendidikan (mencakup akses, distribusi sekolah, perbandingan jumlah sekolah dengan populasi), serta hal-hal sejenis (Fatah et al., 2021), hingga sebagian wilayah masih memerlukan peningkatan dalam hal kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan (Alifah, 2021). Masalah lainnya juga disebabkan karena banyaknya wilayah pedesaan yang terisolasi dan berjauhan dari perkotaan dalam mencapai layanan pendidikan yang masih belum tersebar dengan merata (Zulkarnaen & Dwi Handoyo, 2019), sehingga perlu ada solusi dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan di Indonesia (Astawa, 2017;

Montolalu, 2015). Dalam sosiologis, masyarakat dipandang memiliki struktur subsistem yang beragam, yang berbeda satu sama lain, ini berasal dari struktur dan makna fungsionalnya yang berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan (Maunah, 2016), dan ini dikenal sebagai struktural fungsional. Gagasan dari struktural fungsional ini memandang realitas sosial merupakan interaksi antarsistem, yaitu sistem masyarakat, yang beroperasi dalam keseimbangan dinamis. Sistem ini adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan di satu bagian dianggap akan mempengaruhi perubahan di bagian lain dari sistem (Ichsan, 2018). Dalam perspektif fungsionalisme, manusia dianggap sebagai konsep abstrak yang mengemban status dan peran yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur-struktur sosial. Pada tingkat ekstrem, pendekatan fungsionalisme struktural secara tidak langsung menganggap manusia sebagai aktor yang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat (Adibah, 2017). Pemikiran kedua Robert Merton, yaitu bahwa suatu institusi tidak selalu harus berfungsi atau tidak berfungsi secara umum, tetapi mungkin berfungsi untuk satu kelompok orang dan tidak berfungsi untuk kelompok lainnya, menandai pergeseran dari fungsionalisme yang pada dasarnya menyetujui status quo. Dengan kata lain, Merton menjelaskan konsep tidak berfungsi atau disfungsi. Seorang sosiolog perlu menyadari bahwa tidak semua institusi dapat berfungsi untuk semua orang. Meskipun mungkin berfungsi untuk satu kelompok, institusi tersebut tidak dapat berfungsi untuk kelompok lain (Raho, 2007). Oleh sebab itu, dalam artikel ini akan mengkaji bagaimana ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia dikaji dengan perspektif struktural fungsional oleh Robert King Merton yang pemikirannya berupa fungsi, disfungsi, fungsi manifest dan fungsi laten (Ali & Tohir, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Fokus penelitian akan merujuk pada masalah ketimpangan yang dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Robert K. Merton, khususnya dalam perspektif sosiologi terhadap masalah ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Pendekatan studi kepustakaan diadopsi untuk mendukung peneliti dalam mengumpulkan literatur terkait ketimpangan pendidikan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Ini mencakup berbagai sumber yang mendukung argumentasi, teori, temuan, serta bukti-bukti empiris seperti berita atau majalah yang relevan dan akurat.

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan pencarian informasi melalui studi

literatur yang berkaitan dengan masalah ketimpangan pendidikan, serta mencari literatur atau informasi terkait masalah ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Identifikasi fenomena terkait ketimpangan pendidikan menjadi langkah awal yang membentuk pertanyaan penelitian terkait ketimpangan pendidikan, melibatkan aspek-aspek seperti penyebab dan dampak sesuai dengan kerangka teori struktural fungsional Robert K. Merton. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan informasi dari berbagai sumber yang membantu triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan (Denzin, 2009). Informasi awal dari berbagai sumber digabungkan dengan data terkait penelitian perundangan di Indonesia, termasuk informasi dari media sosial dan berita. Wawasan awal tentang masalah ketimpangan pendidikan membantu menyusun fokus pembahasan utama, yang melibatkan pemahaman tentang ketimpangan pendidikan Indonesia, penyebab ketimpangan, serta dampak yang dihasilkan di masyarakat, semuanya dianalisis dengan menggunakan teori struktural fungsional Robert K. Merton. Pengumpulan data secara keseluruhan melibatkan dukungan dari studi literatur, khususnya dokumen, untuk menangkap informasi terkait ketimpangan pendidikan di Indonesia di Indonesia (Sukmadinata, 2013). Proses analisis data melibatkan pengkodean data (Sugiyono, 2018), yang mencakup proses coding, pembacaan ulang, dan pengelompokan temuan untuk membentuk kelompok data sesuai dengan kategorinya. Adapun pembatasan penelitian dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengungkapkan masalah ketimpangan pendidikan, mekanismenya, serta dampaknya, semua dianalisis dengan menggunakan kerangka teori struktural fungsional Robert K. Merton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pendidikan: Definisi dan Penyebab

Ketimpangan pendidikan diartikan sebagai situasi ketidaksetaraan distribusi lulusan pendidikan di populasi suatu wilayah (Suratman et al., 2014). Ketimpangan pendidikan dapat didefinisikan sebagai ketidaksetaraan atau perbedaan dalam akses dan mutu pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok di suatu masyarakat atau negara. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya dapat menjadi penyebabnya, yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat akses dan mutu pendidikan yang diterima (Muhadzib et al., 2023). Ketimpangan pendidikan mencakup perbedaan dalam akses dan pencapaian hasil belajar antara kelompok sosial, geografis, atau ekonomi yang berbeda (Angrist & Krueger, 2006). Kendala dalam mencapai perbaikan kondisi

sosial-ekonomi di masa depan ini terkadang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali seseorang, seperti jenis kelamin, tempat kelahiran, atau latar belakang keluarga (Ayuningtyas, 2021).

Ketimpangan pendidikan, suatu permasalahan yang umum di berbagai negara, termasuk Indonesia, merupakan hasil dari berbagai faktor yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, politik, dan kemampuan individu. Salah satu akar permasalahan utama adalah pendanaan pendidikan yang kurang memadai, terutama di negara-negara dengan sumber daya ekonomi yang terbatas. Keterbatasan dana sering kali menghambat upaya membangun sistem pendidikan yang efisien dan merata. Di samping itu, sistem pendidikan yang kurang efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga turut menyumbang pada ketimpangan pendidikan. Pendidikan yang tidak optimal dapat menghasilkan siswa yang kurang mampu berpikir kritis dan menghadapi tuntutan masa depan. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga memengaruhi ketimpangan, dengan masyarakat berkesejahteraan rendah kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Pendidikan yang tidak terintegrasi dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat juga dapat menciptakan kesenjangan, menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi perubahan dalam dunia modern. Faktor lain seperti keterampilan guru dan struktur pendidikan yang tidak terstruktur juga memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, penanggulangan ketimpangan pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan pemberian pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat (Anwar, 2022; Natasha, 2013).

Mekanisme Ketimpangan Pendidikan menurut berdasarkan Perspektif Struktural Fungsional Robert King Merton

Dalam konteks ketimpangan pendidikan di Indonesia, terdapat pemikiran Robert King Merton yang berkaitan dengan fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest. Pertama-tama, fungsi manifest pendidikan terlihat dalam kontribusinya terhadap pembentukan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Diharapkan bahwa melalui pendidikan, individu akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Namun, ketika akses pendidikan tidak merata, disfungsi pun muncul. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan memicu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang lebih dalam, menciptakan jurang antara individu yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, ketidaksetaraan pendidikan menciptakan disfungsi dalam masyarakat. Kesempatan pendidikan yang tidak merata memperkuat

disparitas sosial dan merusak kesatuan serta solidaritas sosial. Masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalisasi dari akses pendidikan yang layak cenderung mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga memperkuat siklus kemiskinan. Dengan demikian, ketimpangan pendidikan tidak hanya memengaruhi individu secara langsung tetapi juga berdampak pada stabilitas dan kohesi sosial secara keseluruhan. Selain fungsi manifest dan disfungsi, Merton juga mengaitkan tentang fungsi laten. Hal ini mencakup pengaruh pendidikan terhadap pembentukan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berdampak jangka panjang. Adanya ketimpangan dalam akses pendidikan, nilai-nilai sosial seperti keadilan dan kesetaraan mungkin tidak akan terwujud sepenuhnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan dalam masyarakat, karena individu dan kelompok merasa tidak diakui atau dihargai secara adil oleh struktur sosial yang ada.

Dampak Ketimpangan Pendidikan di Indonesia berdasarkan Perspektif Struktural Fungsional Robert King Merton

Merton, seorang sosiolog yang dikenal dengan teori struktural fungsional, berpendapat bahwa masyarakat adalah sistem yang terintegrasi, di mana setiap bagian memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keseluruhan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ketimpangan ini dapat dilihat sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak merata, di mana akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, seperti keluarga yang memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Ketimpangan pendidikan ini memiliki dampak signifikan pada kesempatan dan peluang sosial individu. Individu dari keluarga yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosial mereka. Sebaliknya, individu dari keluarga yang kurang mampu cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sering kali disebut sebagai masyarakat yang kurang mampu, dan mereka seringkali menghadapi perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, hukum, dan pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan merupakan tantangan yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Ketidakmerataan aksesibilitas pendidikan ini menyebabkan rendahnya standar pendidikan yang diterima oleh masyarakat tersebut (Anwar, 2022). Akibatnya, ketimpangan dalam akses pendidikan akan mengganggu fungsi-fungsi sosial tersebut.

Dari perspektif struktural fungsional, ketimpangan akses pendidikan memiliki

dampak yang signifikan pada fungsi integrasi sosial. Integrasi sosial merujuk pada kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, seperti kesejahteraan ekonomi, stabilitas politik, dan keadilan sosial. Ketika sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hal ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan merusak rasa solidaritas serta persatuan dalam masyarakat. Ketimpangan dalam akses pendidikan dapat menyebabkan kelompok-kelompok sosial yang kurang mampu merasa dikecualikan dan tidak memiliki rasa percaya diri atas kemampuan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Ini dapat mengurangi rasa persatuan dan solidaritas antar kelompok sosial, karena mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga dapat mempengaruhi fungsi reproduksi sosial, di mana masyarakat menghasilkan dan mempertahankan struktur sosial dan norma-norma yang ada. Ketika sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hal ini dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan mengidentifikasi diri mereka dalam masyarakat, serta cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam proses reproduksi sosial dan mempengaruhi cara mereka memahami dan mengidentifikasi diri mereka dalam masyarakat. Selain itu, dari perspektif struktural fungsional, ketimpangan dalam akses pendidikan juga dapat menghambat fungsi adaptasi masyarakat. Ketika sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas, hal itu dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Akibatnya, ketidaksetaraan pendidikan dapat memperburuk kemiskinan dan memperkuat siklus kemiskinan dalam masyarakat.

Ketimpangan pendidikan juga dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Keluarga-keluarga yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak kekayaan dan kekuasaan, yang pada gilirannya memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial. Ini menciptakan ketimpangan yang lebih besar antara kelas-kelas sosial, di mana kelas atas memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, sementara kelas bawah menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencari kesempatan. Dalam konteks ini, pendidikan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan dan memperkuat struktur

sosial yang ada. Ketimpangan pendidikan mencerminkan dan memperkuat ketimpangan sosial yang ada, di mana akses terhadap pendidikan yang berkualitas tinggi menjadi indikator kemampuan seseorang untuk mengakses kekuasaan dan kesempatan dalam masyarakat. Untuk mengatasi dampak negatif dari ketimpangan pendidikan, diperlukan upaya untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada. Ini dapat dicapai melalui kebijakan pendidikan yang inklusif, pendanaan yang merata, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang latar belakang mereka.

SIMPULAN

Ketimpangan pendidikan di Indonesia yang dikaji dengan perspektif teori struktural fungsional Robert K. Merton menyoroti dimensi yang mendalam. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip seperti fungsi, disfungsi, fungsi manifest, dan fungsi laten yang ada dalam teori Merton, hal ini dapat menggambarkan bagaimana akses pendidikan yang tidak merata mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Ketimpangan pendidikan tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga mempengaruhi stabilitas dan kohesi sosial secara luas. Dengan memahami dampak negatif dari ketimpangan pendidikan, diperlukan tindakan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah ini. Dengan kerjasama yang harmonis dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), 171–184.
- Ali, I., & Tohir, A. (2018). Analisis Fungsionalisme Struktural Untuk Melihat Optimalitas Pelaksanaan Gerbang Salam Di Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(1), 23–52.
- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mengejar Ketertinggalan dari Negara Lain. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113–123.
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72.

<https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.581>

- Angrist, J. D., & Krueger, A. B. (2006). Empirical strategies in labor economics. In *Handbook of labor economics* (Vol. 3, pp. 1277–1366). Elsevier.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15.
- Astawa, I. N. T. (2017). Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2), 197–205.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009-2023.
- Byrne, B. (2013). Hidden contradictions and conditionality: conceptualisations of inclusive education in international human rights law. *Disability & Society*, 28(2), 232–244. <https://doi.org/10.1080/09687599.2012.699282>
- Fatah, A., Suhaili, M., & Farida, I. (2021). Analisis Indikator Pendidikan: Partisipasi Pendidikan di Indonesia Periode 1994-2018. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 555–564.
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617–1620.
- Ichsan, A. S. (2018). Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional). *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial Dan Agama*, 5(02), 153–166.
- Leahy, K. (2016). Winning the Future: An Investigation into the Creativity Capacity Across the Levels of Education in Ireland. *Creativity Research Journal*, 28(2), 188–197. <https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1162543>
- Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(2), 159–178.
- Montolalu, A. A. (2015). Peranan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar di kecamatan Matuari Kota Bitung1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1132.
- Muhadzib, R. K., Yusnita, U., & Sharon, G. (2023). Upaya Mengatasi Ketimpangan Pendidikan Menurut Konvensi Internasional. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(1), 95–107.

- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan: Faktor penyebab, dampak, dan solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 53–64.
- Nurhuda, H. (2022). Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan. *Dirasah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 127–137.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Reay, D. (2018). Miseducation: inequality, education and the working classes. *International Studies in Sociology of Education*, 27(4), 453–456.
<https://doi.org/10.1080/09620214.2018.1531229>
- Schleicher, A. (2019). *PISA 2018: Insights and interpretations*. Oecd Publishing.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39.
- Suratman, B., Soesatyo, Y., Soejoto, A., & others. (2014). Analisis faktor yang memengaruhi ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2).
- Tchamyou, V. S. (2020). Education, lifelong learning, inequality and financial access: evidence from African countries. *Contemporary Social Science*, 15(1), 7–25.
<https://doi.org/10.1080/21582041.2018.1433314>
- Zulkarnaen, Z., & Dwi Handoyo, A. (2019). Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. *Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri*, 4.